


4



**KEPEMIMPINAN, POLITIK
KEPENTINGAN, POLITIK LOKAL,
KETOKOHAN, DAN SEJARAH
SOSIAL DI KESULTANAN
QADARIYAH**

BAB XXIII

*CINTA, POLITIK DAN KEPENTINGAN*¹

A. BAGIAN 1

Banyak orang berpendapat cinta dan politik tidak dapat dipersatukan. Kalaupun ada unsur "cinta" di dalam politik, itu bukan cinta sejati bukan pula cinta yang dalam dan berakar (*unrooted, indeep, untrue love*), karena selalu ada unsur kepentingan di dalamnya sangat mendasar dan mendominasi, terutama kepentingan material dan jabatan atau kemudahan lainnya yang berkaitan dengan dua kepentingan itu secara pribadi atau kelompok.

Sebaliknya, seandainya ada politik untuk mencintai atau memperoleh cinta, ini lebih tepat disebut cara atau strategi mendapatkan cinta dari seseorang atau suatu kelompok – memang harus ada upaya memperoleh cinta dari suatu kelompok atau seseorang. Upaya itupun kadangkala juga hanya dimotivasi masing-masing oleh kepentingan sesaat dan oleh keinginan memiliki, yang kadang mengandung unsur ketidaktulusan. Cinta menurut beberapa orang bijak (Utuy T. Sontani, 1950. *Awal dan Mirah*. Jakarta: Balai Pustaka) bukan untuk dimiliki, tetapi untuk dirasakan dan dijalankan, tidak saja oleh mereka yang terlibat langsung, tetapi juga oleh keluarga besar mereka dan masyarakat, dan harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.. Kegagalan amat sering terjadi pada pencarian pertama cinta atau pada perjalanan memeliharanya bilamana pencarian cinta sering dilandasi oleh kepentingan material sesaat dan mengandung

¹ Tulisan ini merupakan sumbangan pemikiran bagi para calon Rektor, Gubernur dan Wakilnya, Bupati dan Walikota beserta para wakil mereka masing-masing yang akan bertarung dalam pemilihan tahun 2007 dan 2008, serta masyarakat pemilih dan para simpatisan mereka. Sumbangan pemikiran ini diharapkan agar mereka selalu ingat dan beerorientasi pada kepentingan masyarakat, daerah dan negara. Artikel ini, yang merupakan bagian pertama dari dua tulisan pernah dimuat pada Ruang Interaktif dalam *Harian Equator*, terbitan Selasa, 17 Oktober 2006, halaman 11.

paksaan, serta tidak dilandasi oleh hati nurani. Karena itu, cinta yang diperoleh dengan motif hanya ingin merealisasikan kepentingan pribadi dari suatu kelompok, atau kalau hanya ingin memburu cinta dari seseorang secara sangat berlebihan, melindungi secara berlebihan, dan "membelenggu" kebebasan orang yang dicintai, pada ujungnya hanya akan menimbulkan kebencian dan kekecewaan besar, kalau upaya dalam memperoleh dan menjalankan cinta seperti itu mengalami kegagalan.

Keentingan Pribadi yang Abadi.

Pertanyaan tentang mengapa cinta dan politik tidak dapat dipersatukan dapat dijawab dengan pribahasa Ilmu Politik: tidak ada kawan dan musuh abadi, tetapi yang ada hanyalah kepentingan pribadi yang abadi (*there are no permanent friends nor permanent enemies, but only permanent personal interests*). Ini berarti bahwa kita jangan pernah berharap akan mendapatkan atau tidak mendapatkan dukungan secara benar-benar ikhlas dan abadi dari anggota badan perwakilan dalam hal ini dari badan legislatif, misalnya dari para anggota DPR/MPR, anggota Senat Fakultas atau Senat Universitas atau para anggota kelompok masyarakat pemilih dari sebuah daerah/kawasan pemilihan: misalnya rakyat pemilih BALON Bupati/Walikota di daerah Kabupaten/Kota, BALON Gubernur di daerah Provinsi, atau BALON Dekan/Rektor dari para dosen di Fakultas/Universitas.

Walaupun para pemilih tersebut telah bersahabat dan telah sangat akrab dengan kita, dan telah merasakan kemanfaatan dari kebijakan pembangunan atau terobosan yang dilakukan selama jabatan kita sebelumnya, bahkan mereka telah berjanji akan mendukung kelanjutan usaha berikutnya pada tingkat selanjutnya, tetapi mereka dengan tanpa alasan meninggalkan kita dan memilih orang lain. Hal ini sangat mungkin terjadi. Setelah itu persahabatan dan kepedulian menjadi sirna, cinta dan sayang menjadi melayang. Kembali kepada pribahasa politik yang dikemukakan sebelumnya: jangan berharap ada kawan bahkan ada lawan yang abadi, apa yang ada dan abadi adalah kepentingan pribadi. Pribahasa politik tersebut membuat kita

menjadi maklum bahwa adalah sulit untuk mempersatukan cinta dengan politik praktis.

CINTA, POLITIK DAN KEPENTINGAN ²

B. BAGIAN 2

Fetithisme dan Kepentingan

Pribahasa politik tersebut masih menjadi realitas karena manusia sering kehilangan kontrol terhadap dirinya sendiri. Kepentingan yang berkaitan dengan materi, jabatan, pangkat, fasilitas dan kemudahan lainnya yang akan diperolehnya dari proses menjatuhkan pilihan pada seseorang, sangat mendominasi. Kepentingan ini cenderung mengalahkan apa saja, termasuk cinta dan kedekatan sebuah persahabatan. Pada saat demikian kepentingan jangka pendek tersebut dapat dipandang sebagai sebuah komoditas yang dapat menghasilkan uang, materi lain atau apa saja, sedangkan persahabatan tidak dapat diperjualbelikan. Karena itulah, manusia yang kehilangan kontrol terhadap dirinya secara manusiawi ini, sebagaimana dikritik oleh Marx dan Lukacs (dalam Ritzer dan Goodman, 2003. *Modern Sociological Theory*. New York: McGraw-Hill:171-173) menjadi penganut masing-masing fetithisme dan Reifikasi yaitu selalu mendewakan komoditas yang pada konteks ini adalah kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya. Mereka berprinsip uang dapat membeli segala-galanya, termasuk harga diri. Prinsip ini tampaknya berlakunya pada diri mereka sendiri dalam mana harga diri mereka sendiri dapat diperjualbelikan.

Dengan prinsip dan sikap semacam ini kita telah kehilangan momentum tidak saja sebagai manusia tetapi juga sebagai warga bangsa. Sebagai manusia, kita telah meyakini harkat dan martabat kita baik sebagai manusia yang

² Artikel ini merupakan sumbangan pemikiran bagi bakal-bakal calon Rektor, Gubernur dan Wakilnya, Bupati dan walikota beserta wakil-wakil mereka masing-masing yang akan bertanding pada 2007 dan 2008 serta masyarakat pemilih atau simpatisan mereka agar mereka dapat menjadi para calon dan para pemilih yang berorientasi pada kemajuan masyarakat, daerah dan bangsa. Artikel ini yang merupakan bagian kedua dari dua tulisan pernah dimuat pada Ruangan Interaktif dalam *Harian Equator* terbitan Rabu, 18 Oktober 2006, hal.11.

memiliki harga diri dan hati nurani paling dalam, maupun sebagai manusia yang memiliki perasaan, rasa syukur dan terima kasih. Dengan demikian manusia seperti itu berkarakter super materialistis dan egoistis bagaikan robot-robot yang tidak berjiwa. Sebagai warga bangsa, kita juga telah menyalakan seseorang yang telah kita kenal dengan kerja keras, karya, wawasan, kualifikasi, profesionalisme dan integritas pribadinya, dan kita menutup mata dan hati kita akan kelebihan orang itu dengan tidak memilih, berfihak dan mempertahankannya sebagai pemimpin, tetapi memilih orang lain, karena orang lain itu bisa memenuhi kepentingan dan menjanjikan jabatan buat kita, padahal kita tahu persis kualifikasi, integritas dan komitmen mereka diragukan.

Itulah yang telah dan sedang terjadi di negara ini dan menyebabkan terpuruknya bangsa ini, khususnya daerah ini, karena masih berlaku realitas: sikap adalah fungsi kepentingan, dan kepemimpinan adalah fungsi dari situasi sosial. Bagaimana sikap seseorang tergantung dari kepentingan jangka pendeknya, dan siapa pemimpin yang tampil dan bagaimana kepemimpinannya merupakan perwujudan dari kondisi mereka yang dipimpin: wawasan dan tingkat kualifikasi seorang pemimpin tidak akan berbeda jauh dari kondisi mereka yang dipimpin. Semoga kondisi memilukan ini segera berubah.

Politik dan Cinta.

Seseorang yang memiliki integritas dan prinsip tidak tergoyahkan, kualifikasi tinggi, kerja keras, profesionalisme dan komitmen, sering mengalami banyak kesulitan dalam menapakkan karirnya ke jenjang lebih tinggi ke posisi pengambil keputusan, sehingga ia dapat lebih leluasa merealisasikan obsesinya untuk lebih meningkatkan hasil karya yang telah ia atau orang lain capai sebelumnya. Pada kondisi seperti ini ia memerlukan pendamping dan sahabat yang ikhlas. Pada konteks ini, saya percaya bahwa politik harus dapat disandingkan dengan cinta. Namun, kadangkala ia menghadapi realitas pahit: kesepian, ditinggal oleh orang-orang yang pernah dekat dan memperoleh keuntungan dari posisinya sebelumnya, karena ia hanya mampu memberikan

”pancing,” tidak ahli dalam memberikan ikan dan dalam menjanjikan kedudukan.

Dalam mempersandingkan politik dengan cinta, kita telah membuka peluang bahwa tidak saja kepentingan pribadi dan kelompok dapat dikontrol dan dinomor sekiankan sehingga hidup ini menjadi lebih indah dan bermakna dan tegaknya prinsip bahwa uang tidak dapat membeli segala-galanya, termasuk harga diri. Kesemuanya adalah buat kemajuan ke depan, kepentingan orang banyak dan meningkatkan kualitas dan daya saing nasional, regional dan global. Dengan mempersandingkan politik dan cinta, kita juga tidak ”melemparkan” orang-orang yang berkualitas, berkualifikasi, berintegritas tinggi dan memiliki jaringan nasional dan internasional yang luas, seperti terjadi pada Sultan Hamid II Alkadrie, B.J. Habibie, Burhanuddin Lopa, Billy Yudono, Munir dan banyak lagi putra Indonesia lain yang harus terlempar, masuk ”kotak,” bahkan mati dibunuh. Dengan demikian kita juga telah mensosialisasikan nilai-nilai kepada generasi penerus bahwa kita dan mereka seharusnya lebih menghargai orang-orang yang memiliki integritas pribadi, kemampuan, kualifikasi, wawasan dan komitmen yang tinggi, bukan sebaliknya. Dengan demikian, kita telah banyak berbuat hal yang berarti bagi bangsa dan daerah ini: mengurangi keterpurukan, mengangkat harga diri dan menciptakan generasi Indonesia baru yang berwibawa, percaya diri dan tidak materialistis. Semoga.

BAB XXIX

PILKADA KALBAR DAN NANAN SUKARNA³

A. BAGIAN 1

Isu yang paling menarik untuk dibicarakan sekarang ini disamping pemilihan Rektor Universitas Tanjungpura (PILREK UNTAN) sudah tentu adalah Pemilihan Kepala Daerah/Gubernur Kalimantan Barat (PILKADA/PILGUB KalBar). Kalau Balon-Balon Gubernur dan Wakil-Wakil mereka dalam PILKADA dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak lagi melalui DPRD, Senat Universitas pada PILREK UNTAN pada tahap kedua masih memiliki kesempatan untuk memilih atau mengutak-ngatik tiga Balon yang telah terpilih oleh para dosen pada pemilihan tahap pertama.

Akan tetapi PILREK UNTAN tidak dapat dikatakan sebagai "tidak demokratis," karena Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) atas nama Menteri Diknas mengendaki hal itu masih harus dilakukan, karena Undang-Undang dan Peraturan baru, yang mengatur pemilihan langsung oleh para dosen tanpa campur tangan Senat Universitas, belum ada. Karena itu isu PILKADA/PILGUB Kalbar tampaknya lebih demokratis dan menarik, dan ia telah menjadi lebih menarik lagi, karena nama Brigjen. Drs. Nanan Sukarna pernah disebut-sebut sebagai yang dijagokan dalam PILKADA KALBAR.

³ Artikel ini yang merupakan bagian pertama dari dua tulisan pernah dimuat pada Ruang Interaktif dalam Harian Umum *Equator*, terbitan *Selasa, 10 Oktober 2006*, halaman 11. Tulisan ini dibuat saat Brigjen Drs. Nanan Sukarna masih sedang menjabat Kepala Polisi Daerah (KaPolDa) KalBar sebagai penghargaan dari sebagian besar rakyat KalBar atas kerja keras dan upaya Kang Nanang tiada henti semasa jabatannya dalam menangani keamanan pada umumnya, khususnya dalam pemberantasan Penebangan hutan secara liar, kriminalitas dan kasus NarKoBa.

Walaupun pada akhirnya Brigjen. Nanan Sukarna menegaskan bahwa ia menolak diusung menjadi Bakal Calon (BALON) Gubernur Kalbar (Ptk Post, 28/8-2006:19), tetapi isu penjagoan namanya pernah mencuat bahkan isu tersebut sempit menjadi diskusi, debat publik dan dialog yang menarik dan informatif. Kelompok yang pernah mencuatkan dan menjagokan nama KAPOLDA Kalbar yang sedang menjabat sekarang ini, sebagai orang yang sangat pantas untuk menjadi gubernur Kalbar, diwacanakan pertama kali oleh Gusti Hersan Aslirosa (Ptk. Post, 5/7-2006:21), ditimang-timang oleh Abdul Hamid, diidolakan oleh Gunawan Pratama (dalam Pontianak Post, 11/9;30/8-2006:21) dan dipertegas berdasarkan pada kemampuan dan integritas pribadinya oleh Mulyadi dan Bujang Bachtiar (Ptk. Post, 28/8-2006:19; 30/8-2006:21). Sebaliknya ada pula mereka yang kontra dengan wacana pencalonan tersebut, dan menganggap wacana itu sebagai tidak tepat, salah sasaran, dan pernyataan yang terlalu berlebihan (Nasrun AR, Ptk. Post, 28/8-2006:19).

PILKADA KALBAR DAN NANAN SUKARNA⁴

B. BAGIAN 2

Kekaguman dan Kerinduan.

Selama ia bertugas di Kalbar, ada kesan bahwa Brigjen. Drs. Nanan Sukarna telah menampilkan *performance* yang sangat luar biasa. Sepak terjang yang ia lakukan telah menarik simpati banyak orang terutama dalam penegakan hukum, disiplin dan pemberantasan kriminal serta pelanggaran lainnya. KAPOLDA yang satu ini telah menimbulkan kekaguman masyarakat Kalbar, yang diwakili oleh Ketua DPRD Kota Pontianak yang secara terang-terangan menyatakan: "..... saya juga harus jujur menyatakan kekaguman saya kepada KAPOLDA ini, POLDA Kalbar di bawah kepemimpinan Pak Nanan betul-betul merupakan sebuah organisasi yang sangat kreatif"⁴. Saya sendiri merasakan ada kerinduan masyarakat Kalbar terhadap figur pemimpin yang memiliki integritas pribadi yang tinggi, tegas dan berani, kreatif, konsisten, tidak pandang bulu, dan mau mengakui kekhilafan dan kekeliruannya beserta kesalahan anak-anak buahnya. Ini adalah salah satu ciri orang besar yang tidak dimiliki banyak orang. Itulah salah satu faktor mengapa ia dijagokan untuk tampil sebagai BALON Gubernur Kalbar. Apalagi kalau tindakan positif yang ia lakukan -- sebagaimana dikatakan oleh Alqadrie (Ptk Post, 26, 27/9-2006:19) sebagai tindakan pemberantasan kekerasan yang tampak -- didukung pula sepenuhnya oleh tindakan dari pihak instansi terkait lainnya dalam menghilangkan sumber kekerasan atau sumber kejahatan dan sistem atau

⁴ Artikel ini yang merupakan bagian kedua dari dua tulisan pernah dimuat pada Ruangan Interaktif dalam Harian Equator, terbitan Rabu, 11 Oktober 2006, halaman 11. Tulisan ini dibuat saat Brigjen Drs. Nanan Sukarna masih sedang menjabat selaku Kepala Polisi Daerah (KaPolDa) KalBar sebagai penghargaan dari sebagian besar rakyat KalBar atas kerja keras dan upaya Kang Nanang tiada henti semasa jabatannya dalam menangani keamanan pada umumnya, khususnya dalam pemberantasan Penebangan hutan secara liar, kriminalitas dan kasus NarKoBa.

struktur kekerasan yang tidak tampak, barangkali keterpurukan dan indikasi "tebang pilih" dalam menumpas kriminalitas di daerah ini akan segera berkurang. Dengan kondisi seperti itu, bukan tidak boleh jadi Brigjen. Nanang yang dimunculkan sebagai BALON Gubernur akan terpilih sebagai Gubernur Kalbar secara aklamasi.

Konsep Putera Daerah.

Dibalik kekaguman dan keinginan menjagokan Brigjen. yang satu ini menjadi BALON orang nomor satu di KALBAR, ada pula sekelompok kecil masyarakat yang belum sepenuhnya menerima wacana tersebut sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Inilah namanya demokrasi: kebebasan berpendapat, berwacana dan kemauan menerima perbedaan pendapat dan perbedaan lainnya.

Paling tidak ada dua alasan ketidaksetujuan terhadap Kang Nanang untuk dijagokan sebagai BALON Gubernur di daerah ini. Pertama, kelompok ini sebenarnya sayang kepadanya, sehingga mereka tidak membiarkan si Sang Jago ini tampil sebagai BALON. Kalau ia dibiarkan terus melenggang sebagai BALON Gubernur, KAPOLDA ini bakal bingung sendiri memikirkan perahu mana yang akan dipakai dengan harganya yang tidak murah untuk ukuran seorang dosen atau mantan Rektor sekalipun. Ini bukan tidak boleh jadi juga pada akhirnya Sang Jago akan kehilangan momentum integritas dan konsistensi setelah memperoleh perahu. Kedua, kelompok kecil yang kontra dengan wacana pemunculan sang KAPOLDA mungkin masih teringat dengan Konsep Putra Daerah yang tampaknya mulai diberlakukan secara implisit sebagai aturan bermain dalam PILKADA KALBAR. Ketidaksetujuan mereka terhadap wacana pemunculan tersebut tidak disebabkan bahwa Brigjen. Nanang bukan putra Kalbar, tetapi lebih menyangkut masalah teknis yaitu waktu dan lamanya bermukim.

Berdasarkan Konsep Putra Daerah yang telah dikemukakan dan disebarluaskan oleh Alqadrie (1999;2000;2005) mereka yang dikategorikan sebagai putra

daerah KALBAR adalah tidak hanya orang-orang keturunan Dayak dan Melayu yang sampai sekarang masih tetap bermukim di KALBAR, tetapi juga mereka dari luar dua kelompok etnis ini baik yang telah dilahirkan maupun yang telah berada di daerah ini selama paling kurang satu generasi, atau 25 tahun. Dari konsep ini, siapa saja dan anggota kelompok etnis mana saja, seperti para anggota seluruh kelompok etnis Indonesia termasuk anggota komunitas Tionghoa di Kalbar, yang memenuhi kriteria kelahiran dan lamanya bermukim, dapat dikategorikan sebagai putra daerah. Karena itulah, Nasrun AR (Ptk Post, 28/8-2006:19) melihat wacana memunculkan Brigjen Nanan Sukarna mengundang pro-kontra. KAPOLDA ini diterima, dikagumi dan dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat KALBAR, tetapi ia belum lama bermukim di daerah ini.

Menurut saya, penolakan Brigjen Nanan untuk diusung menjadi Gubernur Kalbar sangat tepat dan mengandung kearifan, walaupun ia pernah dinyatakan sebagai salah seorang yang memenuhi kualifikasi sebagai pemimpin KALBAR (Zulfadli dalam Ptk Post, 28/8-2006:19). Paling tidak ada tiga hal mengapa penolakan itu dipandang sangat arif. Pertama, ia sangat tahu diri dan percaya masih banyak figur-figur lain di KALBAR yang juga berkualifikasi tinggi. Kedua, ia mempunyai masa depan karir yang sangat bagus yang seharusnya ia jalani dengan kerja lebih keras dan berintegritas lebih tinggi lagi di hari mendatang. Setelah memperoleh prestasi dan reputasi tertinggi di Pusat dengan melalui proses waktu, ia akan ditunggu oleh masyarakat Kalbar untuk menjadi pemimpin KALBAR di masa depan, tentu dengan melalui proses demokrasi.

Masyarakat KALBAR tidak bersifat kesukuan dan provinsialisme, mereka biasa dan sering dipimpin oleh figur-figur dari daerah lain sejak kemerdekaan. Mereka akan menerima siapapun, dari kelompok etnis atau komunitas dan asal keturunan manapun untuk menjadi pemimpin di daerah ini asal figur-figur itu mau berjuang bahu membahu bersama mereka dalam meningkatkan kesejahteraan dan harga diri mereka dan daerah ini. Apa lagi figur semacam Brigjen. Drs. Nanan yang sepakterjangnya di KALBAR selama ini telah

mulai menjadikan daerah ini disegani para kriminal, tentu akan mereka terima. Saya percaya, masyarakat KALBAR telah mulai menyadari pentingnya kualifikasi dan integritas pribadi pemimpin yang akan mereka pilih untuk membangun dan mengejar ketertinggalan daerah ini, walau bukan dari kelompok mereka sendiri. Semoga.

BAB XXX

*KENANGAN, HARAPAN BUAT KAPOLDA LAMA DAN BARU, DAN OBSESI BAGI KAPALA DAERAH KALBAR*⁵

A. BAGIAN 1

Seperti biasa setiap pagi sebelum sarapan saya ”menyantap” Harian Akcaya Pontianak Post (APP) dan Equator (E). Pada hari itu, Jum’at 27 Oktober 2006, dua Harian itu tertulis berita tentang kepindahan Brigjen Nanan Sukarna ke Jakarta. Kemudian Selasa, 31 Oktober beliau telah meninggalkan Pontianak. Berita pagi itu mengandung dua hal: kesedihan dan kebahagiaan bagi masyarakat Pontianak.

Kesedihan dan Kebahagiaan.

Brigjen. Nanan adalah salah satu dari sedikit jumlah pejabat Pusat yang memiliki kepedulian terhadap hari depan daerah ini, sangat dekat dengan, menjadi idola dan pelindung masyarakat. Untuk hal-hal tertentu, ia menjadi kawan diskusi bagi sebagian anggota masyarakat, bahkan, ia adalah seorang kawan seperjuangan dari beberapa tokoh masyarakat. Jadi, mutasi Kang Nanan ke Jakarta merupakan kebahagiaan, kesedihan dan kehilangan besar bagi daerah ini dan masyarakatnya secara keseluruhan.

Terlepas dari alasan setiap mutasi merupakan hal yang rutin, ada dua fihak yang merasa senang atau bahagia dengan mutasi itu: (1) Perpindahan tugas atau mutasi merupakan

⁵ Artikel ini yang merupakan bagian pertama dari dua tulisan pernah dimuat pada Ruang Interaktif dalam Harian *Equator terbitan Sabtu, 4 November 2006*, halaman 11. Tulisan ini berisi kenangan dan harapan buat Brigjen. Drs. Nanan Sukarna dan Brigjen. Drs. Zainal Abidin Ishak masing-masing sebagai KaPolDa lama dan baru. Selain itu tulisan ini juga sebagian berisi obsesi kepada Kepala Daerah KalBar yang merupakan hasil obrolan kami berdua ketika Kang Nanan datang ke rumah saya (penulis) 11 Oktober 2006.

salah satu bentuk dari kelanjutan dan peningkatan karir yang pada ujungnya juga akan bermanfaat bagi negara, bangsa dan daerah dimana pejabat itu pernah ditempatkan. Karena itulah, kepindahan Brigjen. Nanan Sukarna bagi sebagian besar kelompok masyarakat Kalbar sangat membahagiakan mereka. (2) Fihak kedua yang hanya terdiri dari sekelompok kecil masyarakat terutama yang kepentingan negatif jangka pendek mereka "dirugikan" atau "terganggu" dengan kebijakan dan sepak terjang Brigjen Nanan, merasa bahagia dan serasa menjadi pemenang dengan dimutasikannya sang mantan KAPOLDA ini.

Harapan Buat KAPOLDA Baru.

Dua tahun keberadaan Brigjen Nanan di KALBAR untuk ukuran tugas negara dirasakan cukup lama, tetapi untuk ukuran pejabat teras kepolisian yang telah berhasil mengurangi kejahatan, bahkan membuat berkurangnya nyali sebagian besar kriminal di sektor kehutanan dan NARKOBA di daerah ini, kehadirannya dirasakan sangat sebentar. Masyarakat KALBAR melihat bahwa KAPOLDA yang tegar dengan segala macam ancaman dan tidak mempan dengan segala macam "bujukan halus" agar tidak konsisten dan konsekuen dengan kebijakannya, dianggap telah berhasil dalam menjalankan tugasnya dan menginginkan tugasnya diperpanjang. Kalaupun tugasnya tidak diperpanjang karena tenaganya diperlukan ditempat lain, penggantinya yaitu Brigjen Zainal Abidin, hendaknya dapat meneruskan kebijakan dan kiprah Brigjen Nanan. KAPOLDA yang baru ini harus didukung agar ia dapat bertugas dengan baik dan dapat pula memahami masyarakat KALBAR yang tidak neko-neko, tetapi memerlukan pemimpin yang berfihak kepada mereka, bukan hanya sebagai alat Pusat yang setelah menyelesaikan tugasnya lalu pulang ke daerahnya dengan meninggalkan sejuta satu macam persoalan baru di KALBAR.

Mencari Kawan.

Brigjen Nanan mengalami bermacam pengalaman yang mungkin lebih banyak duka daripada sukanya, dan berbagai tokoh masyarakat mengalami pula sentuhan psikologis

mendalam dengan sepakterjangnya selama ia bertugas di daerah ini lebih dari dua tahun. Kesan seperti itu juga saya alami ketika ia datang ke rumah saya, katanya untuk diskusi Kamis, 11 Oktober 2006.

Mulanya saya sedikit keberatan mantan KAPOLDA ini datang menemui saya di rumah saya. Apa jabatan dan pangkat saya sampai seorang KAPOLDA ingin menemui saya, lagi pula memang bukan tipe saya untuk ingin dikunjungi pejabat. "Sebaiknya saya saja yang menemui beliau di kantornya," usul saya kepada AKBP Drs. Suhadi, SW, M.Si – Kabid Humas POLDA KALBAR, seorang alumnus S1 FISIP dan S2 Magister Ilmu Sosial UNTAN -- tentang rencana yang sangat tiba-tiba itu. Suara Mas Suhadi diujung lain minta secara serius agar Brigjen Nanan saja yang menemui saya di rumah saya.

MATAHARI TERBIT DI BARAT

KENANGAN, HARAPAN BUAT KAPOLDA LAMA DAN BARU, DAN OBSESI BAGI KAPALA DAERAH KALBAR⁶

B. BAGIAN 2

”Kalau Pak Syarif menemuinya di Kantor POLDA, saya khawatir pangkat saya bisa turun,” jawabnya tegas. Mendengar demikian saya serta merta setuju.

Obsesi tentang Kepemimpinan Daerah.

Diskusi informal kami berjalan sekitar 2 jam dan mencakup hal-hal yang sangat luas mulai dari pribadi dan keluarga, tugas masing-masing, kriminalitas dan pelanggaran serta hari depan termasuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) KALBAR. Hampir 2/3 dari waktu diskusi itu berkaitan dengan Pemilihan Gubernur (PILGUB) KALBAR 2007. Dari saran dan ide-ide cemerlangnya, Brigjen Polisi yang konsisten ini tampaknya merupakan figur pemimpin masa depan. Ia memiliki kepedulian sangat besar terhadap daerah ini lebih daripada yang saya pernah perkirakan.

Dalam diskusi yang dilingkupi oleh suasana persahabatan itu, kami tampaknya lebih mengarah pada obsesi masyarakat KALBAR tentang siapa sebenarnya calon gubernur yang mereka inginkan. Pada kenyataannya, kami berdua berada dalam satu posisi yang relatif sama: apa yang diinginkan masyarakat adalah juga menjadi obsesi kami. Obsesi itu sebenarnya berkaitan erat dengan persyaratan atau indikator yang masyarakat inginkan untuk dimiliki oleh para calon Gubernur yang akan terpilih nanti. Kami menyadari benar bahwa sebenarnya masyarakat sudah kenal dan tahu dengan

⁶ Artikel ini yang merupakan bagian kedua dari dua tulisan pernah dimuat pada Ruang Interaktif dalam Harian Umum *Equator* terbitan *Minggu*, 5 November 2006, halaman 11. Isi tulisan adalah berisi kenangan, harapan buat Brigjen. Drs. Nanan Sukarna dan Brigjen. Drs. Zainal Abidin Ishak masing-masing sebagai KaPolDa lama dan baru. Selain itu tulisan ini juga sebagian berisi obsesi kepada Kepala Daerah KalBar yang merupakan hasil obrolan kami berdua ketika Kang Nanan datang ke rumah saya (penulis) 11 Oktober 2006.

para Bakal Calon Gubernur (BALONGUB) mereka, namun mereka masih menginginkan BALONGUB memiliki persyaratan pokok yang menjadi obsesi mereka.

Persyaratan-persyaratan yang seharusnya dipenuhi oleh BALONGUB KALBAR 2007 – 2012 yang juga menjadi obsesi kami paling tidak ada empat: (1) Bersih dari segala indikasi Nepotisme, Kolusi dan Korupsi (NKK) – maaf, saya lebih cenderung menggunakan istilah tersebut daripada istilah KKN yang telah berjalan mulus di perguruan tinggi (PT); (2) Hendaknya masing-masing BALON mengadakan introspeksi tidak hanya untuk masa mendatang ketika mereka memimpin tetapi juga apa yang pernah terjadi pada masa lalu ketika mereka pernah memimpin. Jika dirasakan ada bersinggungan dengan hal yang merugikan negara dan masyarakat banyak – kita sendirilah yang tahu -- masyarakat menginginkan ada keputusan heroik yang mengedepankan martabat dan harga diri; (3) Jadikan momentum Idul Fitri ini sebagai proses kembali ke Fitriah (kebersihan diri seperti saat lahir yang bersih dari noda dan dosa) manusia. Akan tetapi kembali ke Fitriah ini tidak berhenti pada saat Idul Fitri yang merupakan hari kemenangan manusia setelah berpuasa sebulan penuh, tetapi ia adalah proses kejiwaan dan batin yang berjalan terus tanpa henti menjaga kebersihan dan kesucian diri atau Fitriah, khususnya ketika Calon telah terpilih menjadi Gubernur; (4) Keberfihakan yang jelas secara konsisten dan konsekuen kepada daerah dan masyarakatnya khususnya masyarakat miskin yang diwujudkan dalam bentuk pembukaan lapangan kerja menyeluruh, mendukung perluasan kabupaten, tetapi memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang tidak efisiennya pembentukan provinsi baru, karena tidak menyentuh rakyat secara langsung; (5) Apa motivasi menjadi Kepala Daerah: untuk popularitas atau untuk menyejahterakan rakyat, harus jelas. Pengamatan kami, rakyat memerlukan motivasi kedua.

Itulah kira-kira obsesi masyarakat KALBAR terhadap pemimpin mereka yang kami fahami selama ini. Semoga para pemimpin dan kita semua mendapat petunjuk dariNYA.

BAB XXIV

*KAPOLDA, PIN ANTI KKN, DAN SIRI' MASIRI*⁷

A. BAGIAN 1.

Pada malam resepsi pisah sambut, saya diperkenalkan oleh KAPOLDA lama, Brigjen Nanan Sukarna, kepada KAPOLDA baru, Brigjen Zainal Abidin. Perkenalan kami pertama malam itu merupakan permulaan dari proses persahabatan yang seterusnya mengalir deras seperti air segar penyiram daerah yang gersang dari perhatian Pusat.ini.

Kesan pertama pada Brigjen yang satu ini adalah ia ramah; murah senyum; berwibawa. Tidak seperti kebanyakan orang Sulawesi Selatan --khususnya orang Bugis-- yang saya kenal, ia berkulit agak putih kekuning-kuningan seperti darah biru mengalir di dalam tubuhnya. Ia sarat dengan pengalaman kedinasan, tampak pada kewibawaan, dan caranya memandang dan berbicara kepada orang lain --dua kali menjabat sebagai KAPOLDA ditempat yang rawan --Kepolisian Daerah (POLDA) Sulawesi Tenggara dan POLDA Sulawesi Tengah, dan seonggok lagi jabatan lain sebelumnya..

⁷ Artikel ini yang merupakan bagian pertama dari dua tulisan pernah dimuat pada Ruangan Interaktif dalam Harian Umum *Equator* terbitan *Sabtu, 2 Juni 2007*, halaman 10. Tulisan ini antara lain berisi perkenalan pertama kali penulis dengan KaPolDa baru KalBar, Brigjen. Drs. Zainal Abidin Ishak, yang diperkenalkan oleh Brigjen. Drs. Nanan Sukarna, mantan KaPolDa pada malam Resepsi Pisah Sambut. Selain itu, penulis melihat kedua figur pejabat teras PolDa KalBar ini merupakan sebuah contoh sangat baik dari proses kepemimpinan berkesinambungan, karena mereka memiliki tekad untuk melanjutkan pesan moral dalam bentuk simbol: Saya anti KKN. KaPolDa pendahulunya menempatkan simbol itu di dada dari setiap anggota PolDa KalBar dan untuk dilaksanakan secara konsekuen dalam tindakan sehari-hari, sedangkan KaPolDa pelanjutnya memindahkan simbol tadi "di dalam dada, hati dan jiwa" yang mengikat untuk dilaksanakan secara konsekuen. Pemindahan simbol ini "ke dalam jiwa" merupakan perwujudan dari pelaksanaan nilai *siri'* (malu dan harga diri) khususnya *siri' masiri'* dan *pesse esse babua* di dalam sistem nilai budaya Bugis.

Keinginan Memperbaiki Keadaan.

Anak dari ibu seorang guru SMP dan ayah pegawai DikBud ini, pernah hidup dan dibesarkan disekitar kawasan tempat tinggal orang-orang bermasalah, seperti pelacuran, penjudian, kriminalitas dan korban ketidak-beruntungan lainnya. Kondisi latarbelakang seperti itu telah menempah Zainal kecil menjadi perduli kepada masyarakat kecil, dan mendorongnya menjadi penegak hukum. Setelah menyelesaikan pendidikan di AKABRI Kepolisian 1974, ia memulai karirnya dengan pangkat Letnan Dua di kesatuan Brimob bukan hanya di sekitar kampungnya, tetapi menjadi Kapolda di Sultra dan di Sulteng, dan sekarang menjadi KAPOLDA Kalbar.

Dalam menjawab pertanyaan para wartawan setelah dilantik menjadi KAPOLDA, Brigjen Zainal menegaskan akan melanjutkan apa yang telah dikerjakan pendahulunya, termasuk pemakaian Pin "Saya Anti KKN," dan akan merealisasikan pesan moral pada pin tersebut dengan lebih abadi –dimana dan kapanpun-- karena pin itu tidak lagi ditempel di luar baju bagian dada kiri, tetapi memindahkannya di dalam dada – hati, jantung dan jiwa-- para anggota POLDA Kalbar..

Simbol dan Realisasi.

Dua figur pejabat teras POLDA Kalbar yang sangat disegani ini, Bang Zainal dan Kang Nanang, merupakan sebuah contoh konkrit dari proses kepemimpinan isi mengisi dan berkesinambungan. Pendahulunya meninggalkan pesan moral dalam bentuk simbol yang ditempatkan di dada untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Pelanjutnya memindahkan simbol tersebut ke dalam dada, hati dan jiwa yang mengikat untuk dilaksanakan dalam setiap denyut jantung para anggota POLDA Kalbar, walau tanpa baju dinas tempat bertenggernya pin itu.

Apa yang dilakukan pendahulunya dengan pin di atas dada memang tepat pada tahap masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kalbar, masih hidup dan berada di dalam dunia simbol, slogan, angan-angan dan mimpi yang

berada di luar diri sendiri, jauh dari realitas. Lihatlah masalah kebersihan, keindahan, kesehatan, keramahan dan keamanan kota-kota di Indonesia yang masih diwujudkan ke dalam simbol dan slogan seperti antara lain Kota Bestari (Bersih, Sehat, Aman, Ramah dan Indah); Kota Beriman (Bersih, Elok, Ramah, Indah, Aman); Kota Berseri (Bersih, Sehat, Elok, Ramah, Indah); Kota Meriam (Menarik, Elok, Ramah, Indah, Aman dan Mantap); dan simbol pelarangan terpampang di depan umum untuk tidak membuang sampah sembarangan dengan sanksi denda Rp 50.000.000,00 atau hukuman penjara 5 tahun.

Sebaliknya dari isi simbol-simbol atau slogan di atas, kota-kota tersebut kumuh, kotor, tidak bersih, tidak indah, masyarakat tidak sehat dan merasa tidak aman lagi dan sampah dibuang dan berlonggok di dimana-mana, dan sebagian mereka tidak ramah lagi bahkan beringas dan cepat tersinggung. Di sinilah tugas pejabat teras daerah ini, gubernur, walikota, para bupati, dan para petugas lapangan di bawah kordinasi beliau-beliau menjadi sangat strategis dalam mengubah dari orientasi hidup di dalam atau pada simbol dan slogan ke orientasi pada realitas dan kerja nyata yang menjadikan hidup lebih bermakna dan tidak lagi berada dalam mimpi, sehingga membuat bangsa ini terpuruk.

KAPOLDA, PIN ANTI KKN, DAN SIRI' MASIRI⁸

B. BAGIAN 2

Karena itulah, proses kesinambungan dalam kepemimpinan POLDA Kalbar berjalan dengan mulus. Brigjen Nanan memulai hal yang baik dengan dan meletakkan dasar idealisme dan rasa malu dalam meningkatkan pelayanan kepada

⁸ Artikel ini yang merupakan bagian pertama dari dua tulisan pernah dimuat pada Ruangan Interaktif dalam Harian Umum *Equator* terbitan *Sabtu, 2 Juni 2007*, halaman 10. Tulisan ini antara lain berisi perkenalan pertama kali penulis dengan KaPolDa baru KalBar, Brigjen. Drs. Zainal Abidin Ishak, diperkenalkan oleh Brigjen. Drs. Nanan Sukarna, mantan KaPolDa pada malam Resepsi Pisah Sambut.

masyarakat Kalbar dengan menggunakan pin: “Saya Anti KKN.” Kemudian, Brigjen Zainal meneruskan misi dan obsesi itu dengan lebih berpijak pada realitas, pasti dan konkrit, dengan menempatkannya di dalam dada. Penempatan pesan moral Pin Anti KKN di dalam dada, jantung dan jiwa agar dapat dilaksanakan dimana dan kapan saja merupakan salah satu bentuk siri’ masiri’ dalam nilai budaya lama masyarakat Bugis.

Siri’ Masiri’

Siri’ masiri’ adalah bentuk kedua dari sistem nilai budaya *siri’* dalam masyarakat Bugis. Bentuk pertama adalah *siri’ ripakasiri’*. Asal kata *siri’* berarti malu, memiliki rasa malu, kemudian berkembang menjadi harga diri atau marwah (*dignity*) (Zainal Abidin, 1982; 1983). Bagi mereka yang menganut sistem budaya *siri’* atau apapun namanya, harga diri adalah segala-galanya dalam jiwa dan harus dipertahankan, termasuk harga diri untuk tidak berKKN atau berbuat apapun yang menghancurkan harga diri bangsa ini. *Siri’ ripakasiri* merupakan bentuk tindakan fisik dengan melukai bahkan membunuh orang lain yang telah mempermalukan seseorang demi mengembalikan harga dirinya.

Bentuk asli dari *siri’ masiri* adalah meninggalkan kampung halamannya, pindah atau merantau ketempat lain untuk mengembalikan dan meningkatkan harga dirinya yang telah dihancurkan baik oleh orang lain atau oleh diri sendiri karena telah mempermalukan dirinya sendiri seperti merasa “bodoh,” miskin atau didesak oleh sistem yang memaksanya melakukan tindakan tidak terpuji. Keberhasilan perantau Bugis sebelum tahun 1960 memperoleh tempat strategis dan terhormat di perantauan mereka merupakan realisasi konkrit dan konsisten dari nilai budaya *siri’ masiri’*.

Untuk kasus pin ‘Saya anti KKN,’ saya melihat KAPOLDA Kalbar telah memindahkan simbol yang berisi kewajiban moral untuk menegakkan harga diri dari yang terselip pada pakaian di sebelah dada kiri ke dalam jiwa dan hati seluruh anggota POLDA Kalbar. Dengan demikian Brigjen Zainal telah menggunakan sistem nilai budaya *siri’*, malu, dan

mengharuskan secara budaya bagi seluruh anggota POLDA Kalbar dan para pejabat di daerah ini untuk meletakkan rasa malu dan harga diri di atas segala-galanya. Alangkah indahnya kalau masyarakat Indonesia, termasuk seluruh pejabatnya memindahkan pin moral itu menjadi kewajiban moral dalam bentuk *siri' masiri* ke dalam jiwa dan hati, dan merealisasikannya mulai sekarang. Inilah salah satu kewajiban dan jalan moral untuk menghindarkan bangsa ini dari keterpurukan.

BAB XXXII

Erwin Mengakar di Hati Masyarakat⁹

PADA Sabtu (7/8), sarapan pagi saya yang ditemani dua koran terbitan Pontianak dan Jakarta, agak terganggu dengan berita Brigjen Drs. Erwin TPL Tobing mendapat tugas baru sebagai Widyaiswara di Pendidikan Kepolisian, Lembang, Jabar. Tugas lamanya selaku Kapolda KalBar digantikan Brigjen Drs Sukrawardi Dahlan yang sebelumnya menjabat Kapolda.

Sarapan pagi saya terganggu bukan disebabkan masalah pemindahan tempat tugas. Permutasian dikalangan pejabat negara adalah wajar dan seharusnya dilakukan dalam menciptakan suasana dan semangat baru. Namun, itu lebih disebabkan fakta bahwa hubungan ‘Bang’ Erwin, begitu ia biasa dipanggil di luar Mapolda, akan segera menjadi kenangan dan berakhir secara formal sejak diserahkan kepada penggantinya di Mabespolri, Kamis (19/8).

Hubungan Khas

Hubungan khas yang dijalin BrigJen Drs. Erwin Tobing baik mengandung unsur positif seperti persahabatan, perhatian, perlindungan dan pembinaan terutama terhadap rakyat kecil seperti hubungan dengan penduduk Kampung Beting, pedagang Kaki Lima, dan pedagang kecil lainnya; dengan mereka pencari keadilan, pejabat negara yang sering dicari kesalahannya, para akademisi yang bekerja sama ikut membesarkan polisi dalam memperkuat masyarakat madani serta membantu fihak-fihak yang diperlakukan tidak adil; dan LSM yang bekerja membangun perdamaian dan pencegahan dan solusi konflik. Kekhasan dan keunikan hubungan itu juga ditampilkan oleh ‘Bang’ Erwin dengan sikap tidak kompromi terhadap mantan kriminal kambuhan atau mereka yang melakukan kriminalitas dan pelanggar hukum lainnya, dan mereka yang pernah bertindak anarkis, serta pengedar Miras dan Narkoba.

Hubungan khas itu dilengkapi pula dengan perintah “tembak ditempat” terhadap mereka yang bertindak anarkhis, melakukan kekerasan dan kekacauan dalam masyarakat. Sikap tegas itu bertambah khas dengan tambahan bahwa tembak ditempat dilakukan dengan peluru ‘karet.’ Namun, hubungan baik Bang Irwin dengan berbagai lapisan dan golongan masyarakat serta sikap tegas tanpa pilih bulu terhadap pelanggar sudah tentu akan diteruskan oleh Kapolda Kalbar yang baru: Brigjen Pol. Drs. Sukrawardi Dahlan.

Haus akan Persahabatan

Setiap Kapolda yang bertugas di Kalbar terbiasa bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat, Bang Erwin juga melakukan hal seperti itu. Dalam silaturahmi di rumah, kami mengobrol ngalur ngidul; akhirnya saya berpendapat bahwa ia memiliki kepedulian dan keprihatinan mendalam baik terhadap anggota kepolisian itu sendiri

⁹ Artikel ini dimuat dalam *Harian Pontianak Post*, terbitan Selasa, 31 Agustus 2010, pada Ruang Opini, halaman 1.

maupun terhadap masyarakat kecil. Hal inilah yang membuat Brigjen yang murah senyum ini berada di hati masyarakat Kalbar dan dekat dengan dunia akademis. Ketika berada di Bandung pertengahan Januari 2010 lalu, saya mendapat SMS dari beliau agar segera pulang ke Pontianak untuk menjadi moderator dalam acara penyelesaian kasus ‘Seruan Pontianak.’ Kasus tersebut melibatkan 77 penanda tangan seruan, anggaphlah sebagai tesis. Kemudian ada 7 lembaga adat serta sejumlah pihak yang keberatan dengan seruan itu sebagai antitesis. Mantan Kapolda prihatin dengan suasana panas antara tesis dan antitesis. Ia tampil tegar dan mengajak saya mendampingi selaku penengah atau sintesis. Saya hanya dapat menulis sebuah artikel dan dikirim via E-mail ke Polda dan dimuat dalam tiga surat kabar Pontianak untuk menyejukkan suasana kontroversi sekitar Seruan itu. Dengan arifnya, sang Mantan Kapolda, layaknya seorang abang bersama “obat penyejuk” dari Bandung, akhirnya kasus, yang sempat memanaskan kota Khatulistiwa ini, menjadi dingin kembali.

Jaringan Luar Negeri

Ketika bertemu dengan Prof. Dr. Timo Kivimaki dan saya awal Nopember 2009 lalu, dengan sedikit bergurau tapi serius, mantan Kapolda yang satu ini, mengundang secara khusus Prof. Timo -- Dosen University of Helsinki, Finlandia dan University of Copenhagen, Denmark-- agar datang lagi ke Kalbar memberikan pendidikan dan latihan kepada para Kapolres, Kapolsek beserta jajaran dan perwira polisi di lingkungan Polda Kalbar seperti kami lakukan sebelumnya. Saya heran dan meragukan. Punyakah Polda dana khusus untuk mendatangkan Profesor, seperti Timo Kivimaki, warga Negara Finlandia yang menjadi peneliti senior di Nordic Institute of Asian Study (NIAS) di Copenhagen, Denmark.

Universitas-universitas besar di Jawa mengalami kesulitan biaya mendatangkan seorang dosen tamu. Karena kedekatan kami sejak tahun 2000, apalagi ia adalah mitra UNTAN dan beberapa PemKab dan Pemkot di Kalbar sebagai dosen tamu dan trainer, Prof. Timo menerima undangan itu, bahkan ia datang ke Pontianak bersama kawannya, Prof. Dr. Tonnesson, dari Norwegia, Juni 2010, untuk memberikan pelatihan kepada para pejabat Polda dengan menggunakan seluruh biaya dari pemerintahnya dan Uni Eropa, tanpa membebani Polda dan UNTAN. Kedua Prof tersebut, Bang Irwin dan saya juga punya obsesi yang sama untuk memberdayakan polisi di Polda KalBar dalam masyarakat Madani.

Makalah Kesultanan Melayu

Keprihatinan kami terhadap kontroversi mengenai satu hal yang tidak berdasarkan pada motif yang logis dan rasional, anarkhisme dan kekerasan tampaknya tidak berbeda, walau Bang Erwin dan saya tidak berasal dalam spesialisasi keilmuan yang sama. Karena itulah ketika terjadi kontroversi dalam sebuah makalah yang menyatakan bahwa Kesultanan dari kelompok etnis tertentu adalah “perompak” dan tugu/patung naga di Singkawang termasuk ritual/tidak sehingga penempatannya dipersoalkan. Hal itu memicu pembelahan tiga kelompok etnis bersaudara yang mengarah pada pembakaran dan kekerasan lainnya. Kami berdua sepakat bahwa kasus makalah dan patung naga mesti diselesaikan secara terpisah. Pro-kontra makalah dibicarakan dalam seminar akademis sedangkan patung naga diselesaikan melalui penelitian ilmiah atau polling. Kasus Singkawang ini membawa juga hikmah terutama bagi kerjasama yang begitu

sinergis antara Kantor Sekretariat Wakil Presiden, UNTAN, STAIN, Polda, Lembaga Jaringan Studi Konflik dan Perdamaian Indonesia (ICPSN) dan Yayasan Swadaya Dian Khatullistiwa (YSDK). Hal menarik dalam seminar itu adalah Kapolda hadir menyampaikan kata sambutan, walaupun ia harus menghadiri acara penting yang sudah diagendakan lama sebelumnya dan sudah akan mengirim seseorang mewakilinya. Ini terbukti bahwa Kapolda memiliki kepedulian dan komitmen yang tidak diragukan terhadap perdamaian dan kehidupan akademis.

BAB XXIII

*POLA TINGKAH LAKU POLITIK LOKAL DI KESULTANAN QADARIYAH PONTIANAK HINGGA 1950*¹⁰

A. BAGIAN 1

Kesultanan Qadriah Pontianak lahir 23 Oktober 1771 bertepatan 12 hari bulan Rajab tahun 1185. Kelahiran ini bersamaan pula dengan periode bercokolnya imperialisme Barat yang menyebabkan kehidupan kesultanan ini tertekan dan tertahan di bawah eksploitasi kekuasaan imperialisme tersebut. Ini berarti bahwa hubungan Kesultanan Pontianak dan Sultan serta rakyatnya, disatu pihak, dengan pemerintah kolonialisme Belanda, bersama pejabatnya, dilain pihak, bersifat tidak seimbang: imperialistis dan eksploitatif. Menghadapi ini, sebagian sultan, pangeran dan para pembantu mereka tampaknya “menerima” perlakuan tidak adil ini “tanpa banyak reaksi dan oposisi,” sehingga ada kesan Kesultanan Pontianak “bersekutu” dengan pemerintahan penjajahan Belanda. Padahal “ketundukan” itu merupakan keterpaksaan dan strategi menghindari konflik militer

¹⁰ Artikel ini terdiri dari 3 (tiga) bagian tulisan yang dimuat secara bersambung. Bab ini merupakan bagian pertama dari tiga tulisan. Tiga bagian dari tulisan ini telah dimuat secara berturut-turut setiap hari pada Ruangan Opini dalam *Harian Pontianak Post*. Bagian pertama dimuat *Kamis, 22 September 2005*, hal. 14. Keseluruhan bagian dari artikel ini merupakan sumbangan pemikiran penulis untuk mengungkapkan fakta yang terdapat dalam sejarah sosial di daerah KalBar, khususnya di Kesultanan Qadariyah, dalam rangka **Festival Budaya Bumi Khatulistiwa (FBBK)**. Pada dasarnya ketiga bagian tulisan ini memiliki tema dan judul induk yang sama yaitu *Pola Tingkah Laku Politik Lokal pada Kesultanan Qadariyah Pontianak*. Namun untuk kepentingan teknis pemuatan dalam kolom Opini, bagian pertama dan kedua dari tulisan ini memiliki judul sama: *Pola Tingkah Laku Politik Lokal pada Kesultanan Qadariyah Pontianak Hingga 1950*, sedangkan bagian ketiga berjudul *Peranan Sultan Hamid II dan Kekecewaannya*.

Pola Tingkah Laku Politik Lokal Di Kesultanan Qadariyah Pontianak Hingga 1950

langsung antara kedua pihak yang berakibat kehancuran bagi kesultanan ini yang tidak memiliki persenjataan yang cukup.

Dua Sikap Dasar.

Dalam menghadapi politik imperialisme dan menghindari konflik senjata langsung dengan Belanda, ada 2 (dua) sikap dasar yang membentuk 2 (dua) kelompok berbeda di kalangan istana dan rakyat Pontianak: Kelompok pertama menentang keras terhadap pemerintah kolonialisme dan imperialisme Belanda, para sultan dan pembantu mereka yang berkuasa saat itu. Kelompok kedua lebih kompromistis terhadap Belanda dan sultan, atas perjanjian memberatkan dan menghinakan kesultanan dan rakyat. Para sultan tidak mempunyai pilihan lain, karena kesultanan tidak memiliki persenjataan secanggih persenjataan Belanda.

Kelompok pertama membentuk pemukiman sendiri yang sampai sekarang disebut Kampung Luar sebagai simbolisasi dari “ke luar atau dikeluarkan dari lingkungan istana” Kampung Banjar dan Kampung Kapur, karena kelompok ini menentang kebijakan Belanda yang tidak adil dan menghinakan, dan mencari pemukiman lain di luar ketiga tempat itu, seperti Kampung Tanjung Saleh, Jungkat dan Kubu, maupun di luar kawasan kesultanan Pontianak yang sekarang disebut Kawasan Kampung Tuan-Tuan, khususnya Desa Bintang Munsir, Kabupaten Ketapang dan kabupaten-kabupaten perhuluan (*the interior upland areas*).

Sikap seperti ini ditunjukkan oleh Sultan Syarif Usman, yang mengundurkan diri dari jabatannya 5 (lima) tahun sebelum ia wafat sebagai protes terhadap Belanda. Pangeran Bendahara Syarif Ja'far -- paman Sultan Syarif Muhammad -- melancarkan protes dan penolakan terhadap penetapan pajak (*belasting*) yang terlalu memberatkan rakyat. Ia diusir Belanda dari Pontianak dan memutuskan untuk merantau ke Mekah dan meninggal di sana. Pangeran Adipati “tua” Syarif Husin Alqadrie -- paman Sultan Muhammad -- menunjukkan penentangannya baik terhadap ponakannya sendiri, yang dianggap “tidak bersikap kritis” terhadap Belanda dan

“memasukkan” cara-cara dan etika pergaulan Barat ke dalam istana, maupun terhadap Belanda yang menetapkan kerja rodi dan pajak yang menekan rakyat serta menuntut penguasa Belanda di KalBar ke pengadilan (*landraad*) Bandung yang mengambil tanah rakyat dengan sewenang-wenang.

Pangeran adipati “muda” aktif dalam pergerakan nasional, bertemu dengan dr. Susilo di Banjarmasin untuk menyusun strategi menentang Belanda dan Jepang, mengorganisir perlawanan dari Kampung Luar dan Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Sungai Kakap. Syarif Maswar Al-Hinduan sangat antipati terhadap Belanda, Jepang dan Gerakan Komunis, bergabung dengan Partai Indonesia Raya (ParIndRa) kemudian Partai Nasional Indonesia (PNI)/Partai Demokrasi Indonesia/PDI.

Selain sultan, pangeran dan para kerabat tersebut di atas, banyak lagi tokoh masyarakat Pontianak menjadi “pemberontak” terhadap Belanda, dan mereka meninggalkan kawasan kesultanan. Keturunan mereka tersebar diseluruh KalBar dan kawasan Nusantara, dan mereka inilah yang memperoleh kemajuan dalam bidang sosial, seperti sektor pendidikan dan sektor lainnya serta bidang ekonomi.

Sultan Abdurrachman Al-Qadrie vs Puteranya, Sultan Kasim.

Kurang lancarnya interaksi social antara Abdurrahman dengan puteranya Kasim antara lain disebabkan oleh fakta bahwa ayahnya lebih mengingini puteranya ini menjadi sultan untuk sementara waktu di Mempawah, dan tidak di Pontianak, sebaliknya Abdurrahman lebih mengizinkan Usman Al-Qadrie menjadi Sultan Qadariyah di Pontianak. Persetujuan Sultan Abdurrahman mengangkat putera-puteranya, Kasim sebagai Sultan Mempawah dan Usman sebagai Sultan Pontianak, didasarkan pada Konsep Putera Daerah. Ibu Syarif Kasim adalah Utin Candramidi, keturunan Dayak Mempawah -- puteri Sultan Daeng Manambon, sedangkan ibu Syarif Usman adalah Ratu Kusumasari, keturunan Dayak Pontianak. Konsep ini ditambah dengan konsep arsitektur yang, menurut pemikiran Dian Alqadrie (2004), dilandasi oleh faktor geografis -- Mempawah

berdekatan dengan kawasan air/laut, sedangkan letak Pontianak adalah di kawasan darat/hutan -- sehingga Kasim seharusnya mengabdikan di Mempawah dan Usman Alqadrie seyogyanya berkuasa di Pontianak.

Syarif Kasim sebagai Sultan Mempawah tidak diijinkan oleh Sultan Abdurrahman untuk datang ke Pontianak menggantikan kedudukannya sebagai Sultan Pontianak setelah ia wafat. Menurut versi Belanda (Rahman, 2000: 110) kekecewaan Sultan Abdurrahman kepada puteranya itu disebabkan ia telah membunuh seorang Kapten kapal Inggris, Nakhoda kapal Cina dan berhutang sebesar 30.000 peso Spanyol. Akan tetapi, kekecewaannya pada puteranya lebih disebabkan Syarif Kasim melaksanakan perjanjian dengan Belanda berkaitan dengan Mempawah. Ini merupakan politik pecah belah (*divide et impera politics*) Belanda. Namun akhirnya, Syarif Kasim diangkat juga sebagai Sultan Pontianak II dengan persetujuan dari Adiknya, Syarif Usman, yang bersedia menjadi Pangeran Ratu setelah Syarif Kasim berjanji hanya memerintah 10 tahun saja. Ia meninggalkan Mempawah dan diganti oleh adiknya, Syarif Hussein, putera Sultan Abdurrahman (Haji Yahaya, 1999:228) sampai pangeran Adi Jaya dewasa dan siap untuk menjadi Sultan di Mempawah.

Kesadaran Sosial Politik, dan Konsep Putera Daerah.

Keputusan Sultan Kasim dan Sultan Hussein mengembalikan pemerintahan Mempawah ke tangan pewarisnya yang paling berhak, Pangeran Adijaya, merupakan bentuk kesadaran politik untuk menciptakan kesetiakawanan social antara kesultanan di kawasan tersebut dalam menghadapi Belanda. Ini juga merupakan realisasi dari Konsep Putera Daerah yang telah lama dijadikan prinsip dalam pengangkatan seorang pemimpin. Sekarang konsep tersebut telah dimodifikasi dan diperkenalkan secara luas oleh Syarif I. Alqadrie (1999;2000;2005) dalam mengatasi ego local/regional (*provincialism/ ethnocentrism*) dan sebaliknya memperkuat NKRI. Selain itu, Kesultanan Mempawah merupakan cikal bakal dari Kesultanan Pontianak yang harus diakui keberadaannya.

Kenyataannya, Sultan Kasim tidak menepati janji. Ia baru menyerahkan kekuasaannya setelah 11 tahun berkuasa kepada adiknya, Syarif Usman, dan bukan 10 tahun sesuai dengan janjinya. Keterlambatannya setahun tampaknya digunakannya untuk menghadapi "masa transisi" antara masa kekuasaan Inggris pada 1811 – 1816 dengan kekuasaan Belanda, agar Syarif Usman, yang belum dewasa, "tidak mengalami kesulitan" dalam menjalankan kekuasaan. Berdasarkan sumber British Library (Dalam Rahman, 2000:111 dan Alqadrie, 1984:76;2005) Sultan Kasim memiliki hubungan erat dengan Inggris di bawah Gubernur Jenderal Thomas S. Raffles, bahkan juga dengan Pemerintah Hindia Belanda ketika ia mendapat pengakuan dari Batavia setelah Inggris menyerahkan kembali Indonesia kepada Belanda.

*POLA TINGKAH LAKU POLITIK LOKAL DI KESULTANAN QADARIYAH PONTIANAK HINGGA 1950*¹¹

B. BAGIAN 2

Pola politik nasional khususnya regional yang bersinggungan langsung dengan Sultan Hamid II adalah kontroversi mengenai persepsi hubungan antara pewaris terakhir tahta Kesultanan Qadriah in dengan Pemerintah R.I. awal Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan dengan Pemerintah Belanda. Karena keprihatinannya terhadap kondisi Kalbar Syarif Hamid Al-Qadrie kembali ke Pontianak, dan ponakannya, Syarif Thaha Al-Qadrie, menyerahkan kekuasaan kepadanya untuk menjadi Sultan Pontianak VIII dengan sebutan Sultan Hamid II. Ia berketetapan hati melanjutkan obsesi leluhurnya untuk membangun Kalbar umumnya dan Pontianak khususnya. Namun, bahwa kehadirannya sebagai pewaris tahta Kesultanan Qadariyah dan sekaligus kepala Swapraja Daerah Kalbar, seperti disinyalir oleh beberapa kalangan di Jawa (Iskandar, 1991:65); Rahman, 2000: 173-175), dianggap didukung oleh Van Mook yang “memanfaatkannya” untuk memecah belah Indonesia, lalu “berkomplot” dengan Belanda untuk “menghancurkan” Republik Indonesia, adalah kurang tepat dan tidak beralasan sama sekali.

Obsesi dan Pemikiran Politik Sultan Hamid II.

Obsesinya yang sebenarnya, menurut Prasaja (1955:163-164) adalah bahwa kedatangan dan dilantiknya Sultan Hamid II sebagai sultan Pontianak merupakan kehendak rakyat, dan

¹¹ Artikel ini terdiri dari 3 (tiga) bagian tulisan yang dimuat secara bersambung dan merupakan bagian kedua dari tiga tulisan. Tiga bagian dari tulisan telah dimuat secara berturut-turut pada Ruang Opini dalam Harian *Pontianak Post*, terbitan *Jumat, 23 September 2005*, hal. 14 dan merupakan sumbangan pemikiran untuk mengungkapkan fakta yang terdapat dalam sejarah sosial di daerah Kalimantan Barat, khususnya di Kesultanan Qadariyah dalam rangka **Festival Budaya Bumi Khatulistiwa (FBBK)**.

setelah langsung berhubungan dengan rakyat, ia, sebagai kepala swapraja, menjadi lebih mengetahui bahwa cita-cita kemerdekaan telah meresap di hati sanubari rakyatnya. “Dalam memperjuangkan kemerdekaan bagi nusa dan bangsa (dan menciptakan kesejahteraan rakyat khususnya rakyat di daerah ini = tambahan penulis),” lanjut Prasaja (1955:164), ia memiliki pemikiran politik tentang daerah ini sebagai Daerah Istimewa dari satu bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan. Prasaja melanjutkan (1955:164) pemikiran seperti ini timbul ketika ia menyadari bahwa ‘bentuk federalisme’ yang sebelumnya dianggapnya paling baik bagi negara ini, ternyata tidak tepat dan masih ada alternative utama yaitu otonomi daerah yang luas dan sepenuhnya.

Pemikiran politik Sultan Hamid II bertujuan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui pemerintahan daerah sendiri yang otonom nyata, kuat dan sepenuhnya, bukan “kepala dilepas ekor dipegang.” Jauh sebelumnya, federalisme memang merupakan wacana pemikiran politik yang pernah diperjuangkannya. Ide politik seperti ini bertujuan menciptakan sistem yang lebih mengandung keadilan dan lebih mampu memakmurkan rakyatnya, bukan mengobrak-abrik SDA dan meninggalkan daerah ini menderita!. Bangsa ini ingin akan menjadi bangsa besar dan bermartabat, jika dimulai dengan obsesi dan gagasan besar bagi rakyat. Sekarang ide besarnya itu baru dapat difahami bahwa keterpurukan, kesenjangan, ketertinggalan daerah dari Pusat dan dari Jawa, dan kekecewaan daerah, seperti Aceh, Papua, Riau dan sebagainya, antara lain disebabkan justru bangsa ini terlalu takut dengan sistem pemerintahan yang lebih mampu menekan keserakahan dan memanusiaikan rakyatnya di daerah-daerah.

Padahal, berbagai sistem dan segala peraturan yang mengikat tidak lain merupakan konstruksi sosial (*social construction*), bukan fakta sosial (*social facts*) (Najib Azca, 1998), yang keberadaannya dan keberlakuannya lebih lanjut ditentukan apakah mereka memberi kemaslahatan dan kesejahteraan bagi banyak pihak –daerah-daerah dan sebagian terbesar rakyat di situ—bukan hanya satu kawasan/daerah atau beberapa kelompok dan sejumlah kecil orang.

Kesenjangan Pemikiran.

Kekeliruan Sultan Hamid II boleh jadi terletak pada fakta bahwa ide politiknya, walaupun masih dalam wacana, ternyata baru bisa digulirkan -- itupun masih belum terlalu aman -- di negeri Pancasila ini, setelah era reformasi, tahun 1998 (setelah 52 tahun!). Wacana ini digulirkannya ketika bangsa Indonesia baru saja selesai mengalami trauma -- diperbudak bangsa lain -- selama lebih kurang 350 tahun, bahkan pada saat “hantu-hantu” penjajahan seperti Van Mook, Van der Zwaal, bergentayangan menciptakan negara-negara bagian, dan pengkhianat-pengkhianat Indonesia, termasuk di Kalbar, bersedia memperoleh upah dari Jepang dan Belanda untuk tega mengorbankan saudara mereka. Kita bisa membayangkan konsekuensi apa yang akan diterima Sultan Hamid II dengan mengeluarkan gagasan besar seperti itu.

Kekeliruan lainnya mungkin terletak bahwa kekuasaan Sultan Hamid II dianggap memperoleh dukungan Belanda; ia aktif bekerjasama dengan negara-negara bagian lainnya di Indonesia; dan sering mengikuti konferensi federal di dalam dan di luar negeri mewakili Kalbar dan RI atas nama Sukarno - Hatta, maupun Badan Penyelesaian Pertentangan Politik Antara Belanda, Negara Bagian dan R.I. (*Bijeenkomst voor Federal Overleg/BFO*) yang Syarif Hamid sendiri adalah ketuanya, sehingga ia sering dicurigai sebagai pengkhianat; dan kurang pengertian dan wawasan sebagian tokoh masyarakat dan pemuda Kalbar terhadap tujuan gagasan politiknya, sehingga sebagian mereka menolak dan menentangnya. Padahal ide politiknya tidak lain adalah prediksinya akan bahaya sentralisme yang mengandung unsur ketidakadilan, keserakahan dan marginalisasi Pusat terhadap daerah. Hal terakhir ini merupakan kekecewaan pertamanya terhadap Pusat dan daerahnya sendiri.

Sebenarnya Pemerintah Pusat dapat melihat peranan Sultan Hamid II dengan *BFO*nya saat itu. Beberapa kali Sukarno - Hatta mengadakan perundingan dan pendekatan dengan *BFO*, pertama di Bangka 28 Mei 1948, kemudian di Yogyakarta 19 Juli, dan dilanjutkan di Jakarta, 23 Juli 1948 (Rahman, 2000:175-178), untuk bersepakat sebelum RI,

negara-negara bagian dan BFO -- dimana Sultan Hamid II menjadi ketua delegasi -- menghadapi Konferensi Meja Bundar di Belanda. Bahkan Presiden Sukarno dan Wakilnya Hatta memanfaatkan *BFO* dan merangkul Sultan Hamid II ke meja perundingan bersama-sama Belanda. Ini adalah strategi Sukarno - Hatta untuk menyatukan Indonesia dalam Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada akhirnya, tahun 1950 negara-negara bagian, termasuk Kalbar, membubarkan diri, dan terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Peranan Sultan Hamid II dan *BFO*nya cukup besar, karena dalam menyelesaikan perselisihan politik antara R.I., Belanda dan negara-negara bagian, ia berpengaruh terhadap sejumlah pemimpin Belanda dan kepala negara-negara bagian, dan ia cenderung berada di pihak R.I.

*POLA TINGKAH LAKU POLITIK LOKAL
DI KESULTANAN QADARIYAH PONTIANAK:
PERANAN SULTAN HAMID II DAN
KEKECEWAANNYA*¹²

C. BAGIAN 3

Tidak lama menjadi Sultan, pangkat Sultan Hamid II dinaikkan menjadi Mayor Jenderal, ia juga mendapat jabatan kehormatan sebagai ajudan Ratu Belanda (*Adjutant in Buitengewone Diens bij H.M. Koningen der Nederlander*). Ini merupakan pangkat dan jabatan tertinggi yang diperoleh seorang putra Indonesia dalam usia 33 tahun dalam pemerintahan Belanda. Namun, peranannya sebagai ketua BFO, juru runding yang berfihak pada R.I., reputasi dalam ketentaraan serta keberhasilannya dalam mengamankan Kalbar, tidak menjadi pertimbangan pemerintah R.I. saat itu untuk memberinya jabatan sesuai dengan kemampuannya.

Sultan Hamid II hanya diangkat sebagai Menteri Negara *zonder portofolio* (bukan Menteri Departemen), walaupun ia menjadi anggota penyusun Kabinet bersama Muhammad Hatta, Sultan Hamengku Buwono IX dan Anak Agung Gede Agung. Inilah kekecewaannya yang kedua. Ia mengakui,

¹² Artikel ini terdiri dari 3 (tiga) bagian tulisan yang dimuat secara bersambung dan merupakan bagian ketiga dari tiga tulisan. Tiga bagian dari tulisan telah dimuat secara berturut-turut pada Ruangan Opini dalam Harian *Pontianak Post*, terbitan *Sabtu*, 24 *September* 2005, hal. 14 dan merupakan sumbangan pemikiran untuk mengungkapkan fakta yang terdapat dalam sejarah sosial di daerah Kalimantan Barat, khususnya di Kesultanan Qadariyah dalam rangka **Festival Budaya Bumi Khatulistiwa (FBBK)**. Pada dasarnya ketiga bagian tulisan ini memiliki tema dan judul induk yang sama yaitu *Pola Tingka Laku Politik Lokal pada Kesultanan Qadariyah Pontianak*. Namun untuk kepentingan teknis pemuatan dalam kolom Opini, bagian pertama dan kedua dari tulisan ini memiliki judul sama: *Pola Tingkah Laku Politik Lokal pada Kesultanan Qadariyah Pontianak Hingga 1950*, sedangkan bagian ketiga berjudul *Peranan Sultan Hamid II dan Kekecewaannya*.

menurut Prasaja (1955:179), sebagai Menteri Negara, ia hanya bertugas menyiapkan gedung parlemen dan membikin rencana lambang Negara (Garuda Pancasila), tidak ada tugas lain sampai ia ditangkap. Bahkan setelah Lambang Garuda Pancasila selesai dibuat dan menjadi Lambang Negara resmi yang diagungkan oleh rakyat Indonesia, nama Syarif Hamid Al-Qadrie sebagai penciptanya, malah sebagai perencanapun, tidak pernah disebut-sebut. Ironisnya, menurut Turiman (2000) berdasarkan hasil penelitian tesis Magisternya, ia menemukan banyak bukti tertulis tentang siapa siapa pencipta dan perancang Lambang Garuda Pancasila itu, Hamid Muhammad Al-Qadrie, bukan Muhammad Yamin, telah melakukan semua pekerjaan mulai dari merancang, membuat dan menyelesaikannya hingga Lambang Garuda Pancasila itu menjadi seperti sekarang ini.

Kekecewaan Sultan Hamid II lainnya adalah: (1) Realisasi bentuk negara RIS tidak seperti diharapkan oleh BFO dalam mana anggota organisasi ini tidak menduduki jabatan penting dalam Kabinet RIS; (2) Ia sendiri, yang memiliki andil besar dalam mempersatukan unsur negara-negara bagian yang bertikai, tidak berhasil menduduki jabatan Menteri Pertahanan, padahal kualitas, reputasi dan karir kemiliterannya terpenuhi. Ada keberatan dari pihak R.I., namun ia dapat memahami dan menerima keberatan itu; (3) Ia juga kecewa terhadap dominasi TNI dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). Komposisi APRIS berdasarkan hasil konferensi Antar Indonesia dan KMB, terdiri dari TNI sebagai inti kekuatan ditambah dengan kesatuan-kesatuan dari bekas KNIL, KMVB, dan sebagainya. Untuk itu Sultan Hamid II telah mempersiapkan satu kompi pemuda dari anggota kelompok etnis Dayak dari KalBar yang telah dilatih untuk memperkuat TNI yang akan dikirim ke KalBar (Rachman, 2000:179).

Mengapa unsur Dayak? (a) Anggota kelompok etnis Dayak berasal dari daerah KalBar dan mereka lebih mengenal daerah mereka sendiri; (b) Dayak dan Melayu memiliki hubungan historis, sosiologis dan psikologis, karena Dayak adalah saudara ibu dilambangkan sebagai “hutan terletak di belakang,” sedangkan Melayu adalah saudara ayah

dilambangkan sebagai “laut terletak di depan;” (4) Ia juga kecewa menghadapi unjukrasa sebagian pemuka masyarakat dan pemuda yang menuntut pembubaran Daerah Istimewa Kalbar, dan penunjukan dr. Sudarso sebagai Kepala Daerah Kalbar, karena Sultan Hamid II dianggap telah meletakkan jabatan sebagai kepala daerah.

Itulah beberapa faktor penyebab mengapa Sultan Hamid II meletakkan jabatan sebagai kepala daerah dan sekaligus sebagai Sultan Pontianak, disamping ia dihukum penjara 10 tahun. Ia harus membayar mahal atas ide besarnya dalam politik yang dipertahankannya secara konsekuen dan atas kesenjangan pemikiran atau wawasan antara dia dan pemuka masyarakat di daerahnya sendiri. Setelah 48 tahun menjelang era reformasi, mereka baru menyadari faktor utama ketertinggalan, keterpinggirkan dan kemiskinan daerah ini dalam segala bidang yang kesemuanya dari dulu telah diantisipasi.

Kita perlu memiliki Hamid Al-Qadrie-Hamid Al-Qadrie lainnya yang memiliki wawasan luas, gagasan politik besar dan konsistensi dalam membangun dan mengejar ketertinggalan daerah ini. Tanpa itu, daerah ini akan tetap akan menjadi sapi perahan dan terpinggirkan.

BAB XXIV

GUBERNUR BARU KALBAR DAN KORELASI ANTAR VARIABEL¹³

A. BAGIAN 1

Pasangan Drs. Cornelis, MH dan Drs. Cristiandy Sanjaya, MM. (C2) telah berjaya dalam PILKADA KalBar 2007. KPUD secara resmi menetapkan mereka sebagai gubernur dan wakil gubernur KalBar dengan perolehan suara 43,67% mengungguli pasangan H. Usman Jafar (UJ) dan Drs. L.H. Kadir (LHK) dengan perolehan suara 30,94% (Ptk. Post, 27/11-07:1; Equator, 27/11-07:1). Selamat atas keberhasilan anda berdua dan selamat datang di Gedung Panjang A. Yani I. Kehadiran anda diharapkan dapat membawa angin lebih segar bagi kemajuan daerah ini.

Tulisan ini ingin mengucapkan selamat dan menghargai kemenangan itu yang diharapkan dapat membawa angin lebih segar bagi kemajuan daerah ini. Ia juga ingin mengungkapkan hal-hal menarik, khususnya menemukan kemungkinan adanya korelasi antar beberapa variabel di dalamnya.

Pesan Kampanya yang Menggigit.

Setiap pasangan calon gubernur (CaGub), wakilnya (CaWaGub) dan Tim sukses masing-masing memiliki kelebihan-kelebihan tertentu dalam menarik massa bagi kemenangan mereka. Mereka juga telah memahami psikologi massa, sehingga "perang tanding" lebih menarik dalam

¹³ Dalam artikel ini penulis ingin menyampaikan ucapan selamat dan ungkapan turut bersuka cita atas terpilih pasangan Drs. Cornellis, MH. dan Drs. Christiandi Sanjaya, MM. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur KalBar priode 2008-20013 dalam PilKada 15/11-2008, dan juga berupaya mengungkapkan hubungan variabel berkaitan dengan kemenangan pasangan tersebut. Artikel ini merupakan bagian pertama dari dua tulisan dan telah pernah dimuat pada Kolom Interaktif dalam Harian Umum *Equator*, terbitan *Rabu dan Kamis, 5 dan 6 Desember 2007*, halaman 10.

“melemahkan” daya tahan masyarakat pemilih dari fihak lain untuk memperkuat kubu sendiri, dan sebaliknya memperkuat daya tahan kubu sendiri agar tidak menyeberang ke pasangan lain. Dari segi inilah, pasangan C2 menampilkan keunggulan mereka sehingga mereka ke luar sebagai pemenang dalam PilKaDa 2007.

Pesan-pesan politik yang disampaikan kepada kubu sendiri dan kubu lain begitu berkesan. Pesan kampanye itu antara lain adalah: ‘Ini saatnya atau tidak sama sekali’; ‘Anda semua adalah tim sukses kami, kemenangan kami adalah kemenangan anda, dan kekalahan kami adalah kekalahan kita semua.’ Bahkan kepada pemilih kelompok sendiri, pesan itu berbunyi: ‘Kalau anda tidak memilih CaGub dari kelompok kita, gali dan masuk saja ke dalam kubur’; Inilah kesempatan kita untuk mengulangi sukses Oevang Oeray; dan lain-lain. Pesan-pesan itu sah-sah saja. Itulah cara ampuh dalam menyesuaikan dengan suasana transisi. Pasangan lain mungkin tidak sempat berfikir begitu, apalagi bertegur sapa dan *say hello* dengan massa pemilih dari lapisan bawah.

Dalam demokrasi, kita seharusnya menghargai siapapun, dari manapun dan keturunan apapun dia. Demokrasi adalah cara, alat dan proses untuk mencapai tujuan, “bukan tujuan” itu sendiri (Yusuf Kalla, dalam *Kompas*, 27/11-2007:1). Kita tidak boleh mundur dari jalan demokrasi yang kita telah mulai lalui, namun kitapun sama sekali tidak boleh mundur dari hasil yang telah kita capai jauh sebelum jalan demokrasi kita pilih. Saya percaya pasangan C2 akan terus dan memperbaiki jalan demokrasi yang kita telah pilih. Mereka berdua juga akan terus meningkatkan hasil yang kita telah capai melalui demokrasi: kebersamaan, penegakan HAM, menghargai perbedaan, keadilan, dan kemakmuran dan kesejahteraan. Kalau jalan itu yang digunakan dan tujuan itu yang dicapai, C2 akan memperoleh dukungan dari semua golongan dan kelompok di KalBar.

Korelasi Antar Variabel.

Melihat daftar rekapitulasi lengkap hasil perhitungan suara 27/11-2007, ada fenomena menarik yang dapat

ditemukan dari angka-angka dan prosentasi-prosentasi tersebut. Dari 12 tingkat pemerintahan daerah, yaitu 10 kabupaten dan 2 (satu) kota, ternyata C2 dimenangkan oleh masyarakat dari daerah pemilihan yaitu 1 (satu) kota dan 7 (tujuh) kabupaten yakni Kota Singkawang, Kabupaten Landak, Bengkayang, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. UJ dan LHK diunggulkan hanya oleh masyarakat pemilih dari 1 (satu) kota dan 2 (dua) kabupaten, yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak dan Sambas. Pasangan OSO dan IL diusung hanya oleh 1 (satu) kabupaten, yakni Kabupaten Ketapang, sedangkan AM dan ARM diorbitkan oleh semua daerah. Walau tidak satu daerahpun memenangkan pasangan no. 3 ini secara penuh, namun jumlah suara perolehan yang mereka dapat dari 5 (lima) daerah pemilihan lebih besar daripada jumlah suara yang didapat oleh pasangan no. 2, yaitu Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu.

GUBERNUR BARU KALBAR DAN KORELASI ANTAR VARIABEL ¹⁴

B. BAGIAN 2

Beberapa fenomena yang terkandung di dalam rekapitulasi tersebut yang dapat dijadikan hipotesis alternatif adalah sebagai berikut:

- (1) Ada hubungan antara variabel geografis dimana Calon, khususnya CaGub berasal, dengan jumlah perolehan suara pasangan tersebut. Pasangan C2, terutama CaGub, yang berasal dari Kabupaten Landak sebagai kawasan pedalaman dekat (*interior valley area*), dimenangkan oleh masyarakat pemilih dengan suara relatif mutlak dari 3 (tiga) kawasan tersebut, yaitu Kabupaten Landak, Bengkayang, dan Sanggau. Kemenangan pasangan ini juga didukung oleh masyarakat pemilih dari 4 (empat) kawasan pedalaman jauh (*interior upland areas*) dengan selisih jumlah suara tidak terlalu besar dibanding dengan jumlah suara yang diperoleh UJ dan LHK, yaitu Kabupaten Sintang, Sekadau, Kapuas Hulu, dan Melawi. Pasangan no.1 ini berasal dari kawasan ini, Sekadau dan Kapuas Hulu, yang menyumbang pada kekalahan mereka yang tidak terlalu telak. Pasangan no.2 khususnya OSO dimenangkan oleh masyarakat pemilih Kabupaten Ketapang yang merupakan tempat kelahirannya.
- (2) Ada hubungan antara variabel etnisitas dari mana calon berasal dengan jumlah suara yang mereka peroleh. CaGub dari pasangan C2, yang berasal dari anggota kelompok etnis Dayak, khususnya Kendayan yang dianggap mayoritas, didukung sepenuhnya oleh masyarakat pemilih dari 7 (tujuh) kabupaten, yaitu Bengkayang, Landak,

¹⁴ Dalam artikel ini penulis ingin menyampaikan ucapan selamat dan ungkapan turut bersuka cita atas terpilih pasangan Drs. Cornellis, MH. dan Drs. Christiandi Sanjaya, MM. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur KalBar priode 2008-20013 dalam PilKada 15/11-2008. Artikel ini merupakan bagian kedua dari dua tulisan dan telah pernah dimuat pada Kolom Interaktif dalam Harian *Equator*, terbitan *Rabu dan Kamis, 5 dan 6 Desember 2007*, halaman 10.

Sanggau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, yang berpenduduk mayoritas Dayak, dan Ketapang dengan penduduk sebagian Dayak. Sementara WaCaGubnya, yang berasal dari anggota kelompok etnis Tionghoa, didukung sepenuhnya oleh masyarakat pemilih Kota Singkawang dengan mayoritas orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa Singkawang (*Singkawang Tionghoanese descendant Indonesians*). Sebaliknya, pasangan no. 1 terutama UJ yang dianggap berasal dari anggota kelompok etnis Melayu didukung oleh masyarakat dari kawasan pesisir yang dihuni oleh mayoritas Melayu, seperti Kabupaten Pontianak, Sambas, dan Kota Pontianak.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari dua hipotesis umum tersebut ialah strategi dan politik berdasarkan kedaerahan dan etnisitas (*geographical and ethnic-based strategy and politics*) masih memegang peranan penting dalam PilKaDa. Politisasi etnis dan asal usul keturunan yang dianggap "meninggalkan" asas profesional dalam setiap pemilihan pimpinan, masih akan berlaku paling tidak 25 tahun ke depan. Pertimbangan itu didasarkan pada prinsip kebangkitan dan kesadaran etnis yang berkarakter ingin sama dengan atau lebih dari kelompok lain dengan tidak melalui proses kompetisi yang layak. Oleh karena itu, tugas berat gubernur baru ialah bagaimana meningkatkan SDM yang berwawasan profesional dan memberdayakan hukum.

BAB XXV

IN MEMORIAM MAYJEN (PURN.) H. ASPAR ASWIN: TUJUH HARI WAFATNYA TOKOH DAN MANTAN GUBERNUR KALBAR

15

A. BAGIAN 1

Berita menggelegar datang ketika kelas FISIP UNTAN baru berjalan 15 menit Rabu pagi, pukul 08.15, 19 Desember 2007. Mayjen (Purn) H. Aspar Aswin telah berpulang ke Haribaan Illahi (ke Rakhmatullah) sekitar pukul 02.00 subuh. Saya harus meninggalkan kelas di FISIP UNTAN yang baru berjalan 15 menit dan segera bergegas ke rumahnya untuk melayat Almarhum yang sedang terbujur kaku dalam perjalanan menuju kehadiran Illahi. Inallillahi Waina Illahi Rojiun. Kita berasal dari-NYA dan kita akan pasti kembali kepada-NYA.

Masyarakat KalBar kehilangan seorang tokoh yang merakyat. Saya kehilangan seorang konco dekat, abang, senior dan guru. "Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang," dan manusia meninggal dunia meninggalkan nama.

Pulang Kampung Dua Kali

Aspar Aswin bukan orang baru di KalBar. Pertama kali dengan pangkat LetKol, ia pernah menjadi KaSRem 121/ Alam Bana Wanawai (ABW), Sintang, 1980-1982. Kemudian sejak 1982 s/d 1985 ia menjabat sebagai Asisten Operasi pada KaSDam VII Tanjungpura, di Pontianak. Selanjutnya ia dipromosikan sebagai Komandan Rinif KoDaM IX Udayana,

¹⁵ Artikel ini merupakan bagian pertama dari dua tulisan dan telah dimuat pada Kolom Opini dalam *Harian Pontianak Post* terbitan *Kamis 27 Desember 2007*, halaman 19. Tulisan ini berisi sebuah kenangan kepada kakak, senior, sahabat, tokoh dan mantan Gubernur KalBar pada 7 (tujuh) hari wafatnya beliau pada 19 Desember 2007.

Tabanan Bali sejak 1985-86. Dari Bali, Aspar Aswin pulang kampung untuk menjabat DanRem 121/ABW pada tahun 1986-1989. Selesai tugasnya, ia diangkat sebagai WaDan PusBanSisOps di Cimahi. Belum genap setahun pada 1989 - 1993, dengan pangkat BrigJen, ia mendapat kehormatan dipilih sebagai Wakil Gubernur Bali. Awal tahun 1993, tentara yang murah senyum ini pulang kampung kedua kalinya, untuk menjadi Gubernur KalBar untuk 2 masa jabatan: 1993-1998 dan 1998-2003. Keberadaannya di KalBar sekitar lebih dari 21 tahun membuat MayJen H. Aspar Aswin membuat ia sangat kenal betul dengan dan mencintai daerah KalBar dan menjadi salah satu figure pemimpin yang mencintai dan dicintai rakyat.

Saya masih ingat benar, ketika pertama kali ia menjadi Kepala Eksekutif di Gedung Panjang Balai Ruai A. Yani I pada tahun-tahun permulaan, saya baru 3 tahun pulang dari menyelesaikan studi di AS. Saya belum begitu kenal dekat dengannya pada saat itu. Apalagi selama ia menjadi Komandan KoRem ABW KalBar saya sedang tidak berada di Pontianak, sehingga dapat dibayangkan kalau kami tidak saling mengenal. Namun, dalam waktu yang sangat singkat kami berdua hampir tidak dapat dipisahkan, walaupun kami tidak berada dalam satu profesi yang sama: Bang Aswin – begitu ia biasa dipanggil—adalah seorang militer karir yang sangat konsekuensi dengan Sapta Marga Prajurit, seorang kepala Eksekutif yang disiplin dan punya komitmen tinggi terhadap masa depan daerahnya, KalBar, dan salah seorang tokoh daerah yang dicintai rakyat. Akan halnya saya, saya hanyalah seorang tenaga pengajar, peneliti dari satu universitas yang belum sangat terkenal pada tingkat nasional dan global pada saat itu, dan anggota masyarakat, tidak lebih dari itu.

Kedekatan dan Visi yang Sama.

Kedekatan kami berdua bukan disebabkan kami pemimpin, pejabat atau orang yang punya otoritas dan saya juga juga seorang pemimpin dari suatu lembaga. Kedekatan itu lebih didasarkan pada kesamaan visi dan kepedulian: visi yang sama yaitu orientasi ke masa depan KalBar yang lebih

baik. Masa depan hanya bisa dibentuk dengan pendidikan yang berstandar tinggi dan berwawasan global. Karena itulah Aswin memiliki kepedulian untuk mengejar ketertinggalan daerah ini dari daerah dan negara tetangga lain dalam berbagai bidang.

Dalam diskusi, rapat-rapat dan pertemuan lainnya, saya dapat tahu dari rekan-rekan juniornya bahwa aktifnya Bang Aswin --begitu biasanya kami memanggilnya--dalam Partai HaNuRa disebabkan oleh kepedulian dan keprihatinannya terhadap kondisi sekarang. Ia ingin adanya kaderisasi dan sosialisasi nilai-nilai positif kepada kaum muda KalBar agar mereka lebih berprestasi dan maju. Visi seperti ini juga mendekatkan kami.

Program Magister Ilmu Sosial UNTAN.

Mungkin banyak orang KalBar, khususnya *civitas academica* UNTAN, lebih khusus lagi FISIP, UNTAN, belum tahu tentang andil besar Aspar Aswin terhadap Program Magister Ilmu Sosial (ProgMagIs) dan program lainnya di S1 FISIP UNTAN. Mengapa? Bang Aswin dengan beberapa stafnya, terutama Bapak Drs. H. Djawari, Wakil Gubernur, dan Bapak Drs. H.A.M. Djapari, SekDa Provinsi KalBar, berperan penting dalam pendirian program-program tersebut. Andil besarnya dimulai dari pemberian rekomendasi dukungan, mengundang dan menjadi tuan rumah DirJen DikTi dan Menteri DikBud RI, yang pada saat itu dijabat oleh Malik Fajar, di Pontianak dan menjadi tamu di kantor maupun di rumah mereka masing-masing di Jakarta bersama dengan saya ikut melakukan pembicaraan tentang pendirian program tersebut. Disamping dukungan moril, berupa saran dan jalan ke luar, dukungan PemDa KalBar sering berbentuk materi seperti bantuan dana bagi berdirinya program tersebut, alat/fasilitas pendidikan, dan beasiswa kepada para mahasiswa baru.

Bantuan material meliputi sebagian dukungan dana ke Jakarta untuk mengadakan "audiensi" dan "lobby" kepada Menteri DikBud dan DirJenDikTi mengenai pendirian program tersebut baik dengan ditemani oleh Bang Aswin maupun sendiri-sendiri. Keperluan untuk itu menjadi relatif cukup

ketika dana itu digabungkan dengan fasilitas yang saya peroleh hampir setiap bulan dari berbagai panitia penyelenggara untuk mengikuti berbagai seminar, diskusi, ceramah, simposium, rapat, penelitian dan kegiatan akademis lainnya, di luar KalBar. Dengan begitu, "*lobby-lobby*" menjadi lancar tanpa perlu setiap saat membebani UNTAN dan fakultas saya.

Alhamdulillah, akhirnya tiga program studi S2 yang diperjuangkan di Jakarta: Program Studi (Prodi) Sosiologi, Prodi Administrasi Negara, dan Prodi Politik, khususnya Politik Lokal dan Hubungan Internasional, telah disetujui hanya dalam waktu satu tahun. Begitu pula, 7 (tujuh) Program D3: Prodi Administrasi Perkantoran, Manajemen Pariwisata, Biro Perjalanan Wisata, Pemandu Wisata, Pekerjaan Sosial, Manajemen Kesekretariatan, dan Ilmu Pemerintah, serta Program Ekstensi, telah berdiri dan sampai sekarang tampaknya masih operasional.

*IN MEMORIAM MAYJEN (PURN.)
H. ASPAR ASWIN: TUJUH HARI WAFATNYA
TOKOH DAN MANTAN GUBERNUR KALBAR*

16

B. BAGIAN 2

Program Rekonsiliasi Nasional.

Hal yang sangat menarik adalah ketika Menteri DikBud, DirJen DikTi, Rektor (mulai dari Bang Mahmud Akil, diteruskan oleh Ir. Purnamawati), Gubernur Aspar Aswin dengan didampingi oleh wakil dan SekDanya, dan saya sendiri, selaku Dekan FISIP UNTAN periode 1995/1997-1997/2000 --disebut Tiga Serangkai-- bersepakat memberi nama program tersebut sebagai Program S2 Ilmu-Ilmu Sosial (ProgS2IIS) 'Rekonsiliasi Nasional,' (RekNas) UNTAN (saat itu program ini belum bernama Program Magister). Mengapa begitu? Karena program itu berdiri pada saat KalBar dilanda pertikaian hebat antara 1995 s/d 2001 dan dimotivasi oleh upaya konkrit jangka panjang mendamaikannya. Salah satu jalan untuk mengatasi musibah nasional itu adalah mendirikan ProgS2IIS yang mampu menciptakan kepemimpinan, wawasan dan intelektualitas.

Berdasarkan perspektif Bang Aswin dan para pendirinya, ProgS2IIS ini bertujuan menciptakan para pemimpin yang berwawasan nasional, regional dan global yang dapat memperkuat NKRI, mampu bersaing dengan alumni lain dengan menjadi profesional di bidang masing-masing sehingga dapat menciptakan kesejahteraan rakyat di daerah. Usaha melahirkan intelektualitas lewat program ini ditujukan untuk menciptakan intelektual yang memiliki kepedulian terhadap

¹⁶ Artikel ini merupakan bagian kedua dari dua tulisan dan telah dimuat pada Kolom Opini dalam Harian Umum *Pontianak Post* terbitan *Jumat*, 28 Desember 2007, halaman 19. Tulisan ini berisi sebuah kenangan kepada kakak, senior, sahabat, tokoh dan mantan Gubernur KalBar pada 7 (tujuh) hari wafatnya beliau pada 19 Desember 2007.

rakyat dan pemikiran konstruktif dan kritis serta menciptakan dan mengembangkan karakter multikultural yang menghargai segala bentuk perbedaan dan karya orang lain.

Tahun-tahun awal beroperasinya ProgMagIS UNTAN adalah masa-masa yang prihatin. Biasiswa dari PemDa KalBar yang diprakarsai oleh Bang Aswin ternyata memacu tidak hanya kinerja pendiri dan pengelola untuk melipatgandakan modal pertama sebesar Rp. 120.000.000 yang diperoleh dari pinjaman BNI. Pinjaman ini dipergunakan merehab gedung, membeli berbagai alat dan fasilitas perkuliahan serta untuk honorarium dosen, dan sebagainya, dan dilunasi hanya dalam waktu 6 (enam) bulan. Biasiswa tersebut memacu semangat belajar mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan mereka dan perdamaian di KalBar.

Beasiswa Etnisitas Rekonsiliasi Nasional.

Dengan figur Aspar Aswin dan Rektor Mahmud Akil, Dirjen DikTi telah mengizinkan ProgMagIS ini menerima mahasiswa baru pada tahun ajaran (T.A) 1999/2000 walaupun SK Ijin Pendirian belum terbit. Begitu operasional pada semester pertama, PemDa KalBar memberikan biasiswa bagi 18 mahasiswa berasal dari tiga kelompok etnis: Dayak, Madura dan Melayu. Biasiswa berlaku untuk 2 (dua) tahun hingga mahasiswa yang bersangkutan lulus Sarjana 2 (Magister Sains). Pada Angkatan II (T.A. 2000/2001), beasiswa ini tetap dilanjutkan untuk 3 (tiga) kelompok etnis yang sama bagi 3 (tiga) program studi terkait. Pada Angkatan III (T.A. 2001/2002) biasiswa tersebut lebih ditingkatkan lagi tidak hanya untuk tiga kelompok etnis tersebut dengan jumlah tetap 18 mahasiswa, tetapi juga untuk kelompok etnis lain yang ada di KalBar dengan jumlah 1 – 3 orang, yaitu Jawa, Bugis, Banjar, Batak, Tionghoa, Minang, dan Ambon atau Manado.

Peningkatan jumlah beasiswa di luar tiga kelompok etnis, Dayak, Melayu dan Madura, dimaksud agar mereka juga memiliki tanggung jawab sama dengan saudara-saudara mereka dari tiga kelompok etnis tersebut dalam menciptakan

rasa aman dan persatuan. Ide ini membuktikan bahwa Aspar Aswin juga memiliki pemikiran akademis dengan mendukung Konsep Putera Daerah.

Pada kosep yang saya cetuskan sejak tahun 1995 (Alqadrie, 2000), mereka yang disebut putera daerah adalah tidak hanya Dayak dan Melayu, tetapi juga semua anggota kelompok etnis lain yang lahir dan telah berada di daerah ini selama satu generasi (25 tahun). Sayangnya biasiswa Rekonsiliasi Nasional ini terputus bersamaan dengan serah terima jabatan (SerTiJab) Aspar Aswin dengan penggantinya. Alur pemikiran seperti ini mendorong Bang Aswin dan Pengelola program tersebut mempersiapkan para pemimpin dan intelektual melalui ProgMagIS untuk meningkatkan partisipasi seluruh kelompok etnis dalam pembangunan daerah ini.

Walaupun beasiswa RekNas ini terputus bersamaan dengan SerTiJab Gubernur Aspar Aswin dengan penggantinya, namun ide besar ini diteruskan oleh para bupati dan walikota se KalBar dengan memberi biasiswa kepada 5 – 15 mahasiswa putera daerah dari daerah mereka masing-masing untuk 2 (dua) tahun ke depan pada T.A. 2002/2003-2004/2005. Mahasiswa tersebut yang berjumlah kurang lebih 90 orang adalah mahasiswa sepenuh masa (*full time students*). Mereka berasal dari daerah seperti Bengkayang, Sambas, Pontianak, Landak, Sanggau, Sintang, Melawi, dan Kota Pontianak dan mereka tergabung dalam Program Kelas Reguler Pagi Sepenuh Masa (*full time morning Reguler Classes*) untuk tiga ProDi. Sayangnya biasiswa yang sangat menantang ini tidak berlanjut dan hanya berlaku satu angkatan. Seharusnya biasiswa semacam ini diperjuangkan untuk diteruskan, karena manfaatnya sangat besar terutama dalam upaya menciptakan lulusan Magister berstandar nasional dan regional.

Adalah tidak berlebihan bila para mahasiswa ProgMa ini menjuluki Aspar Aswin adalah "wakil Rektor," Drs. H. Djawari dan Drs. HAM. Djapari masing-masing "Wakil PuRek I" dan Wakil PuRek II" UNTAN yang berkedudukan di Pemda, karena andil besar mereka terhadap program Magister ini.

Ikhlas dan Positive Thinking.

Bang Aswin pernah menolak halus permintaan saya untuk menulis tentang andilnya dalam pendirian ProMagIS UNTAN saat beliau baik masih menjabat gubernur maupun setelah menjadi rakyat biasa. Ada makna mendalam mengenai dirinya dari penolakan tersebut: (1) kekhilasannya membantu, (2) kedalamannya tentang ajaran Islam yang tidak mau menjadi riak –tangan kanan memberi tidak diceritakan pada tangan kiri; (3) kepribadian yang tidak pernah khawatir seandainya banyak orang tidak mengetahui kebaikan yang telah dilakukannya dan hanya menceriterakan segi negatifnya saja.

Saya tidak dapat berdiam diri untuk tidak menceriterakan kebaikan orang lain secara terbuka, apakan lagi orang tersebut telah meninggal dunia. Inilah salah satu kunci utama mengurangi keterpurukan bangsa ini. Dengan begitu, manusia yang tidak luput dari kesalahan ini akan mau berbuat kebaikan lebih banyak lagi, karena mereka juga dilihat dari segi baiknya, bukan hanya segi negatifnya. Dalam hal ini, Bang Aswin sering berfikir positif terhadap siapapun.

Dunia Akademis Regional dan Perlindungan Masyarakat.

Perhatian Bang Aswin dalam bidang pendidikan tertuju tidakhanya pada tingkat daerah dan nasional tetapi juga pada tingkat regional, yaitu ASEAN dan Asia. Ini sangat mengherankan beberapa pengamat pendidikan, dan hal tersebut jarang diminati oleh para pejabat lain di daerah ini.

Ketika tahun 1996 saya ditunjuk untuk menjadi pelaksana Seminar Nasional Festival Budaya Istiqlal (Kegiatan festival ini diadakan terpusat secara nasional di Jakarta dan juga terpusat secara kewilayaan dengan standar nasional ditiap-tiap daerah, seperti wilayah Kalimantan di pusatkan di Pontianak, Sumatera terpusat di Medan, Jawa terpusat di Surabaya, Sulawesi dipusatkan di Makasar, dan sebagainya), saya mengalami kesulitan mendatangkan seorang ahli Filsafat Kebudayaan Islam dari Malaysia asal Kedah sesuai dengan usul panitia wilayah Kalimantan. Bang Aswin ternyata dapat memafahami keadaan ini dan membantu fihak penyelenggara

baik dalam menemukan maupun mendatangkan ahli tersebut di Malaysia. Bantuan tersebut berdasarkan tidak hanya demi kelancaran penyelenggaraan suatu peristiwa akademis demi nama baik daerah, tetapi juga –ini yang terutama—pemahamannya mendalam akan manfaat kegiatan akademis bertaraf nasional dan internasional bagi pendidikan tinggi di daerah ini.

Begitu juga dalam segi perlindungan pada masyarakat, Bang Aswin pernah memberikan kontribusinya yang berarti. Ketika Lembaga Konsumen Indonesia (LKI), KalBar pertama -- dan mungkin juga terakhir—kali mengadakan pertemuan nasional di Pontianak tahun 1994, ia membantu sebagian besar pendanaan untuk mensukseskan dan ikut mendampingi Menteri Perdagangan pada saat itu membuka pertemuan tersebut.

Kita telah kehilangan seorang pemimpin berwawasan ke depan dan yang memahami kesulitan orang lain dalam membangun daerah ini. Kapan ada Aspar Aswin-Aspar Aswin lain seperti ini di KalBar?